

# **PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NASIONAL DALAM KERANGKA REFORMASI PENDIDIKAN**

Oleh:

**Udin S. Sa'ud, Ph.D**

## **A. Pendahuluan**

Perubahan paradigma dari pola yang serba sentralistik menjadi pola yang desentralistik merupakan konsekuensi dari proses demokratisasi yang pada saat ini tengah diimplementasikan di negara kita. Maraknya tuntutan reformasi total dalam kehidupan berbangsa termasuk didalamnya reformasi pendidikan nasional semakin lama semakin diperlukan, mengingat proses pendidikan nasional merupakan salah satu tuntutan konstitusi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.. Era reformasi menuntut perubahan total dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat dipahami apabila penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di mana transaksi layanan tersebut dilakukan. Pendidikan hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah. Ini berarti bahwa perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan-keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah itu. Dengan kata lain upaya untuk mendekatkan *stakeholders* pendidikan agar akses terhadap perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan yang menyangkut pemerataan dan perluasan layanan, mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan sangatlah beralasan. Inilah gagasan yang melatarbelakangi paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan, yang seperti telah

disebutkan di atas, sangatlah erat kaitannya dengan gagasan desentralisasi pengelolaan pendidikan, yang ketentuannya telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Produk hukum tersebut mengisyaratkan terjadinya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dan melahirkan wacana akontabilitas pendidikan.

Sebagai produk inovatif, tuntutan logisnya diperlukan pemahaman mengenai konsep tersebut dalam konteks persekolahan di Indonesia, bagaimana kebijakan-kebijakan pendukungnya, bagaimana mensosialisasikan ide tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, bagaimana rancangan konstruksi implementasi kurikulum, kondisi-kondisi apa yang perlu dipenuhi untuk kepentingan implementasi tersebut, dan perlunya antisipasi terhadap masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi.

Tinjauan ini memilih dua topik utama yang mendominasi paradigma baru pendidikan dan menyita banyak perhatian masyarakat dan dunia pendidikan selama ini, yaitu (1) Desentralisasi pengelolaan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (School-based Management, SBM), (2) Pembaharuan kurikulum yang mengarah pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competence-based Curriculum, CBC).

## **B. Manajemen Berbasis Sekolah (School-based Management)**

Dalam rangka reformasi pembangunan nasional yang lebih berorientasi kepada pengembangan potensi daerah secara optimum, pemerintah bersama DPR menetapkan UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut merupakan perbaikan terhadap UU No.5/1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU Otonomi

Daerah ditetapkan secara eksplisit bahwa daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan dan mengelola berbagai sektor pembangunan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan, kecuali yang menyangkut urusan pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, agama, kebijakan moneter, dan sistem peradilan. Kelima sektor ini tetap merupakan pelaksana dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Salah satu sektor penting pembangunan masyarakat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah adalah pembangunan bidang pendidikan. Selama ini, pembangunan bidang pendidikan hampir seluruhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat secara sentralistik, baik yang menyangkut kurikulum, sistem pengelolaan, sistem evaluasi, maupun sistem pembiayaannya. Kebijakan pengelolaan sistem pendidikan yang sentralistik ini mengakibatkan kurangnya pengembangan potensi daerah untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam kurikulum 1994, misalnya, semua daerah dituntut untuk melaksanakan kurikulum nasional secara sama rata, tanpa melihat bahwa setiap daerah memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun ada alokasi “muatan lokal”, namun hal ini belum bisa mengakomodasi kepentingan daerah, karena alokasinya terlalu sedikit dan strategi penetapannya yang masih sentralistik.

Sejalan dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah, maka pengelolaan sistem pendidikan secara bertahap didesentralisasikan kepada daerah. Untuk mendukung upaya desentralisasi pengelolaan pendidikan ini, perlu dicari model pengelolaan sistem pendidikan yang mampu mendukung pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia di daerah masing-masing, sehingga dengan sistem desentralisasi ini mutu pendidikan menjadi makin baik dan makin meningkat secara signifikan. Masalah yang muncul

adalah model manajemen pendidikan bagaimanakah yang dapat mendukung upaya pemanfaatan potensi daerah tersebut?. Sebagai option dari upaya pemecahan masalah ini, maka para ahli mengusulkan untuk mengadopsi model *School-Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah) sebagai model pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi sistem pengelolaan pendidikan.

Perubahan pengelolaan sekolah dengan sistem MBS akan memunculkan berbagai perubahan pada berbagai hal, yang salah satunya perubahan dalam manajemen mutu tenaga kependidikan di sekolah. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan (guru) dalam MBS merupakan hal yang cukup mendasar, yang mampu membawa perubahan pada setiap unsur sekolah. Hal tersebut berimplikasi dengan munculnya strategi/program sekolah untuk merencanakan, membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan personil, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui profesionalisme tenaga kependidikan.

### ***Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah***

Manajemen berbasis Sekolah (MBS) merupakan transliterasi dari istilah *School-Based Management* (SBM) sebagai suatu model pengelolaan sekolah secara desentralisasi di tingkat sekolah. MBS merupakan sistem pengelolaan sekolah yang menjadikan lembaga sekolah sebagai institusi yang memiliki otonomi luas dengan segala tanggungjawabnya untuk mengembangkan dan melaksanakan visi, misi, dan tujuan-tujuan yang disepakati. Sekolah memiliki kewenangan luas untuk menetapkan berbagai kebijakan teknis operasional sekolah dengan berbagai implikasinya sesuai dengan kebutuhan aktual siswa atau masyarakat. Dalam MBS, sekolah juga memiliki kewenangan luas untuk menggali dan memanfaatkan berbagai

sumberdaya sesuai dengan prioritas kebutuhan aktual sekolah (Calwell and Spinks, 1988; Department of Education of Quesland, 1990; Mohrman and Wohlstetter, 1994).

Implementasi praktis dari konsep dasar MBS sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya, bahkan dari satu sekolah dengan sekolah lainnya. Hal ini sangat tergantung kepada sistem politik pendidikan dan kebijakan dasar sistem pengelolaan pendidikan yang diterapkan di negara yang bersangkutan. Di negara bagian Quesland, Australia, misalnya, MBS dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dasar pendidikan pemerintah negara bagian dengan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang dihimpun dalam wadah “School Council” dan “Parent and Community Association”. Perpaduan dari dua kepentingan tersebut dibicarakan dan didiskusikan secara terbuka, dan hasilnya dituangkan dalam dokumen tertulis yang dijadikan pedoman bagi semua pihak terkait. Dokumen tertulis tersebut terdiri dari: 1) “school policy” (kebijakan sekolah) yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran prioritas pengembangan program sekolah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama, 2) “school planning review”, yaitu rencana jangka pendek atau menengah sekolah yang memuat berbagai rencana kerja sekolah untuk jangka waktu antara tiga sampai lima tahun, dan 3) “school annual planning”, yaitu program kerja tahunan sekolah yang lebih rinci, termasuk anggaran biaya yang diperlukan.

Penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dan kualitas hasil kegiatan sekolah (*quality assurance and accountability of the school programs*) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara kontinyu oleh berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan sekolah. Bahkan jika perlu, pihak “school council” dan “parent and community association” membentuk tim monitoring dan evaluasi yang bersifat permanen. Anggota tim ini dipilih secara demokratis dari kedua belah pihak sebagai representasi dari kedua

lembaga tersebut. Dengan cara ini, perkembangan dan kemajuan sekolah dapat selalu dimonitor dan diinformasikan kepada kedua lembaga yang bersangkutan sebagai bahan evaluasi untuk perubahan atau perbaikan dokumen yang disepakati bersama.

Secara teoritis, pengelolaan sekolah dalam MBS ditandai oleh adanya karakteristik dasar pemberian otonomi sekolah yang luas dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung program sekolah. Otonomi yang luas diberikan kepada institusi lokal sekolah untuk mengelola berbagai sumberdaya yang tersedia dan mengalokasikan dana yang tersedia sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah secara umum dan mutu hasil belajar siswa. Sekolah diberi kewenangan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa serta tuntutan masyarakat setempat. Dengan otonomi luas ini, sekolah dapat meningkatkan kinerja staf dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam mengambil keputusan bersama dan bertanggungjawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil (Patterson, 1993).

Selain otonomi yang luas, sekolah juga didukung oleh adanya partisipasi yang tinggi dari pihak orangtua siswa dan masyarakat di sekitar sekolah dalam merealisasikan program-program sekolah. Orangtua dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan finansial, tetapi bersama “school council” merumuskan dan mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah secara umum. Masyarakat menyediakan diri untuk membantu sekolah sebagai nara sumber atau organisator kegiatan sekolah yang dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa dan prestise sekolah secara keseluruhan. Orangtua dan masyarakat juga terlibat secara aktif dalam proses kontrol kualitas pengelolaan sekolah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan MBS, sekolah

dituntut untuk memiliki tingkat “accountability” yang tinggi kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam prakteknya, pelaksanaan MBS akan bervariasi dari satu sekolah dengan sekolah yang lainnya atau antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini sangat tergantung dari persiapan aspek-aspek pendukung implementasi MBS di tingkat sekolah serta kemampuan sumber daya manusia pelaksana di tingkat sekolah. Implementasi MBS dalam pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia, khususnya sekolah dasar, memerlukan modifikasi konsep dan aplikasi sesuai dengan kondisi aktual sekolah, agar inovasi yang ditawarkan dapat dilaksanakan dengan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar MBS. Selain itu, penetapan MBS secara praktis perlu dukungan berbagai faktor yang dewasa ini secara aktual ada sekolah, sehingga MBS mampu meningkatkan pengelolaan SD dengan lebih baik.

### ***Persyaratan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah***

Berdasarkan pelaksanaan MBS di negara maju, maka secara konseptual dan praktis dapat diidentifikasi bahwa implementasi MBS secara efektif menuntut adanya persyaratan dasar yang kondusif sebagai berikut:

#### ***1. Pemberian Otonomi Yang Luas Kepada Sekolah.***

Pelaksanaan MBS di tingkat sekolah perlu didasari dan didukung oleh adanya pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dalam pengembangan program-program sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan pencapaian tujuan pendidikan yang dikehendaki. Sekolah perlu diberikan kewenangan yang jelas dan luas untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan-tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat di sekitar sekolah. Sekolah juga perlu memiliki kewenangan

untuk memberdayakan berbagai potensi yang tersedia di sekolah sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dalam pelaksanaan program-program sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki. Kewenangan yang diberikan kepada sekolah perlu dijelaskan secara rinci disertai tugas dan tanggungjawabnya. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada sekolah dari lembaga yang lebih tinggi harus ditetapkan dalam dokumen yang disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dan orangtua dapat memahami berbagai aspek yang menjadi kewenangan sekolah dalam proses pendidikan anak-anak mereka di sekolah.

## *2. Praktek Kepemimpinan Demokratis dan Profesional*

Pelaksanaan MBS di tingkat sekolah memerlukan praktek-praktek kepemimpinan yang demokratis dari pimpinan sekolah dalam berbagai aspek kegiatan sekolah. Kepala Sekolah harus mampu menjadikan staf sekolah yang lain, khususnya guru-guru, sebagai suatu “team-work” yang solid untuk bekerja sama melaksanakan berbagai program sekolah. Penetapan keputusan-keputusan penting yang menyangkut program sekolah dan implementasinya perlu melibatkan seluruh staf sekolah melalui “participatif decision making process”. Dengan melibatkan staf sekolah dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, maka diharapkan para staf memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan program-program sekolah yang berkaitan dengan tugas masing-masing staf sekolah, secara profesional.

## *3. Pemberdayaan Fasilitas Pendidikan yang Efektif dalam Mendukung Program Pembelajaran*

Pelaksanaan MBS untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa perlu didukung oleh kelayakan fasilitas belajar yang ada di sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah harus berupaya



memberdayakan pemanfaatan fasilitas belajar yang tersedia secara optimal. Fokus kegiatan pemberdayaan ini meliputi: pengadaan, pemanfaatan, penggalian, maupun monitoring penggunaan fasilitas belajar yang ada dan dapat disediakan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pembelajaran siswa. Kepala Sekolah dituntut untuk bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait untuk menyediakan ataupun mengupayakan tersedianya fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa, baik ruang belajar, laboratorium, perpustakaan dengan segala koleksinya, maupun fasilitas pendukung lainnya. Pemberdayaan fasilitas ini merupakan peluang dan tantangan bagi pimpinan sekolah dan guru untuk menentukan prioritas pengadaan sesuai dengan dana yang tersedia.

#### 4. *Pengembangan Kinerja Profesional dan Budaya Kerja “Team-Work”.*

Pelaksanaan MBS yang efektif memerlukan budaya kerja yang bersifat “team-work” antara pimpinan sekolah, guru-guru, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program-program sekolah. Pimpinan sekolah perlu menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi guru dan siswa untuk bekerja secara optimal dalam berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Budaya kerja yang bersifat “team-work” ini akan tercipta dengan baik apabila orang memahami tugas dan tanggungjawabnya secara pasti dalam mencapai tujuan-tujuan sekolah.

Selain itu, pimpinan sekolah dan guru dituntut untuk menunjukkan kinerja profesional yang tinggi dalam pekerjaannya. Dalam MBS, setiap orang dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing secara proporsional. Kepala Sekolah sebagai manajer dituntut untuk memiliki kemampuan dan kinerja yang tinggi sebagai manajer yang mengatur penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tuntutan atau target yang disepakati. Guru sebagai fasilitator belajar yang

profesional dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran siswa sesuai dengan program-program belajar yang ditetapkan.

#### *5. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua yang Tinggi dan Intensif*

Pelaksanaan MBS akan efektif apabila masyarakat dan orangtua memberikan dukungan dan partisipasi yang tinggi terhadap program-program sekolah. Partisipasi masyarakat dan orangtua yang tinggi merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak di sekolah. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan orangtua ini terlihat dalam berbagai wujud kegiatan, antara lain: keterlibatan secara aktif dalam dewan sekolah yang bertugas merumuskan visi, misi, dan program kerja sekolah, menyediakan berbagai bentuk bantuan finansial dan non-finansial untuk mendukung pelaksanaan program sekolah, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program sekolah yang disepakati, dan menyediakan dukungan bagi peningkatan anggaran pendidikan dari pemerintah setempat dengan berbagai strategi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **C. Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competence-based Curriculum)**

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negeri, dan isu-isu mutakhir dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru pada jenjang pendidikan dasar.

Kurikulum yang dibutuhkan di masa yang akan datang yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi. Kompetensi dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan,

pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum berbasis kompetensi ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya.

Kurikulum berbasis kompetensi mengembangkan kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Kompetensi ini terdiri atas kemampuan akademik, keterampilan hidup, pengembangan moral, pembentukan karakter yang kuat, kebiasaan sehat, semangat bekerjasama, dan apresiasi estetika terhadap dunia sekitarnya. Secara ringkas kurikulum mengembangkan keharmonisan pemilikan kemampuan logika, etika, estetika, dan kinestika. Dengan demikian, kurikulum dapat membantu peserta didik agar berkembang sebagai individu sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta tumbuh menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya.

### ***Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi***

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang dinamik dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- *Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika*

Kurikulum merupakan input instrumental yang digunakan untuk menyeimbangkan pengalaman belajar yang mengembangkan etika, estetika, logika, dan kinestika.

- *Kesamaan memperoleh kesempatan*

Setiap orang berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Untuk itu perlu adanya jaminan keberpihakan kepada peserta didik yang kurang beruntung dari segi ekonomi dan sosial, yang memerlukan bantuan khusus, berbakat, dan unggul. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjamin persamaan memperoleh kesempatan pendidikan.

- *Memperkuat identitas nasional*  
Kurikulum harus menanamkan dan mempertahankan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia melalui pemahaman terhadap pemeliharaan identitas nasional, patriotisme, sikap nonsektarian, kemampuan untuk bertoleransi terhadap perbedaan yang ditimbulkan oleh agama, ideologi, wilayah, bahasa, dan jender, sehingga bermanfaat dan mengembangkan kesadaran, semangat, dan kesatuan nasional.
- *Menghadapi abad pengetahuan*  
Globalisasi dalam bidang informasi, komunikasi, dan teknologi menyebabkan semakin meningkatnya fenomena perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan, sehingga diperlukan kurikulum yang mendorong untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dan kemampuan berpikir dan belajar dalam mengakses, memilih, menilai pengetahuan, dan mengatasi situasi.
- *Menyongsong tantangan teknologi informasi dan komunikasi*  
Teknologi informasi dan komunikasi berpotensi untuk menyediakan kemudahan belajar elektronik atau belajar dengan kabel on-line yang mempermudah akses ke dalam informasi dan ilmu pengetahuan baru yang tidak tertulis dalam kurikulum, oleh karena itu diperlukan kurikulum yang luwes dan adaptif terhadap berbagai pengetahuan baru sesuai dengan keadaan zaman.
- *Mengembangkan keterampilan hidup*  
Pendidikan perlu menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan keterampilan hidup untuk menghadapi tantangan hidup yang terjadi di masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam kurikulum perlu dimasukkan keterampilan hidup agar peserta didik memiliki kemampuan bersikap dan berperilaku adaptif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif.

- *Mengintegrasikan unsur-unsur penting ke dalam kurikulum*  
Kurikulum perlu memuat dan mengintegrasikan pengetahuan dan sikap tentang budi pekerti, hak asasi manusia, pariwisata, lingkungan hidup, dan nilai-nilai universal lainnya yang disesuaikan dengan sifat mata pelajaran pokok yang relevan dan perkembangan kemampuan peserta didik.
- *Pendidikan alternatif*  
Pendidikan tidak hanya terjadi secara formal di sekolah tetapi juga harus terjadi di mana saja, meliputi pendidikan non formal, pendidikan terbuka, pendidikan jarak jauh, sistem lain yang lentur yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi non pemerintah.
- *Berpusat pada anak sebagai pembangun pengetahuan*  
Upaya untuk memandirikan peserta didik untuk belajar, berkolaborasi, membantu teman, mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu refleksi akan mendorong mereka untuk membangun pengetahuannya sendiri.
- *Pendidikan multikultur dan multibahasa*  
Pendidikan perlu menerapkan metodik yang produktif dan kontekstual untuk mengakomodasikan sifat dan sikap masyarakat pluralistik dalam kerangka pembentukan jati diri bangsa.
- *Penilaian berkelanjutan dan komprehensif*  
Penilaian berkelanjutan mengacu kepada penilaian yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri dengan proses penilaian yang dilakukan secara transparan. Penilaian harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup aspek kompetensi akademik dan keterampilan hidup.
- *Pendidikan sepanjang hayat*  
Pendidikan harus berlanjut sepanjang hidup manusia dalam rangka untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar tentang dunia

yang berubah dalam segala bidang. Dalam hal ini kurikulum harus menyediakan kompetensi dan materi yang berguna bagi peserta didik bukan hanya untuk kepentingannya di masa sekarang, tetapi juga kepentingannya di masa yang akan datang dengan memberikan fondasi yang kuat untuk inkuiri dan memecahkan masalah yang merupakan titik awal untuk menguasai cara berpikir bagaimana berpikir dan belajar sepanjang hidupnya.

### ***Tugas Pokok Guru dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi***

Mengingat begitu pentingnya peranan antara guru dan peserta didik dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, maka guru dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang positif. Guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif agar siswa bersedia terlibat sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran. Ada lima fungsi guru dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai (1) manajer, (2) fasilitator, (3) moderator, (4) motivator, dan (5) evaluator. Sebagai *manajer* dalam pembelajaran, seorang guru pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan. Dengan demikian guru bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan belajar siswa. Sebagai *fasilitator*, seorang guru berfungsi untuk memberi kemudahan (kesempatan) kepada siswa untuk belajar. Guru tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, namun guru berperan penting untuk dapat menunjukkan sumber-sumber belajar lain kepada peserta didiknya. Sebagai *moderator*, guru bertugas mengatur, mengarahkan, mendorong dan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Guru merupakan motor atau daya penggerak dari semua komponen pembelajaran

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai *motivator*, guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong siswa untuk mau belajar dan memiliki keinginan untuk belajar secara kontinu. Sedangkan sebagai *evaluator*, guru bertugas mengevaluasi (menilai) proses belajar mengajar dan memberikan umpan balik hasil (prestasi) belajar siswa, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik

Untuk melaksanakan fungsinya yang sangat menentukan tersebut, guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai. Tanpa kemampuan yang cukup, sulit diharapkan bahwa guru dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tujuan kegiatan belajar mengajar akan tercapai. Guru harus mampu merencanakan dan melaksanakan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan kondisi siswanya, guru harus mampu menggunakan berbagai pendekatan dan metode pengajaran. Selain itu gurupun harus memiliki kepribadian yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswanya. Dengan kata lain seorang guru harus memiliki kemampuan pribadi, kemampuan profesional dan kemampuan sosial. *Kemampuan pribadi* meliputi berbagai karakteristik kepribadian seperti integritas pribadi, adil, jujur, disiplin, simpatik, terbuka, kreatif, berwibawa dan lain-lain. *Kemampuan profesional* meliputi penguasaan materi pelajaran dan kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Sedangkan *kemampuan sosial* meliputi keterampilan berkomunikasi dengan siswa dan dapat bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembelajaran.

## REFERENSI

- Brozo, W, Brobst, A. and Moje, E. (1994). *A Personal View of Teacher Change*. *Childhood Education*, 7 (2), 70-72
- Bruce, J., & Marsha, W. (1980). *Models of Teaching*. New Jersey: Prentice Hall Inc
- Calwell, B.J. and Spinks, J.M. 1988. *Towards the Self-Managing School*. London: The Falmer Press.
- Department of Education, Quesland, AU. 1990. *Focus on School: The Future Organization of Educational Services for Students*. Brisbane, AU: Dept. of Educational Publications.
- Depdikbud. 1995. *Perbandingan Pendidikan di Indonesia dengan Negara Lain*. Jakarta: Pusat Informatika, Balitbng Depdikbud.
- Fullan, Michael. (1992). *The Meaning of Educational Change*. Toronto: OISE Press.
- Gafur, A. (1999). *Disain Instruksional*. Solo: Tiga Serangkai
- Hamalik., O. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hannaway, J. and Carnoy, M. (Ed.). 1995. *Decentralization and School Improvement: Can We Fulfill The Promise?*. San Francisco, CA: Jossey Bass Publishers.
- Joyce. B. Weil, M. and Showers, B. (1992). *Model of Teaching (fourth edition)*. Boston: Allyn and Bacon Publishing Co.
- Marilyn, K., & Quanrantalory. (1987). *Effective Teaching. Principles and Practice*. London: Scott, Foresman and Company
- Mohrman, S.A; Whhlstetter, P. and Associates. 1993. *School-Based Management: Organizing for High Performance*. San Francisco, CA: Jossey Bass Co.



*Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000* tentang Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Pelaksanaan UU Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999.

*Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000* tentang Perangkat Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Eselonisasi Jabatan Dinas Daerah.

Pusat Kurikulum-Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas

Sa'ud, Udin S. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sebagai Wujud Nyata Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional: "Strategi manajer pendidikan dalam menghadapi desentralisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan", tanggal 17-18 Juli 2000 di UPI, Bandung (tidak diterbitkan).

-----, 2001. *Strategi dan Model Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management) Menuju Sekolah Mandiri*. Makalah disajikan dalam diskusi panel "Sosialisasi Konsep dan Model MBS" bagi para Kepala SD se Kota Bandung, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2001.

-----, 2002. *Prospek dan Tantangan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi di Tingkat Sekolah* (Makalah Seminar dan Lokakarya)

Selkov-Brecher, J.L. 1992. *A Successful Model for School-Based Planning*. Educational Leadership Journal, September 1992.

Tim Teknis Bappenas. 1999. *School-Based Management di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta: Bappenas.

*Undang-undang nomor 22 tahun 1999* tentang Otonomi Daerah.

*Undang-undang nomor 25 tahun 1999* tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

World Bank Report. 1999. *From Crisis to Recovery*. Jakarta: World Bank Office.

